

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WISATA ALAM
KALIWUNGU MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL OLEH DINAS
KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT**

Naila Ayu Aidah¹, Maesaroh², Nina Widowati³



Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of the high number of people working in the agricultural sector (40,635,997 people) as well as the sector that has the highest percentage of poor households (51.33%) can be overcome by community empowerment through Social Forestry. Community empowerment of the Kaliwungu Nature Tourism Forest Farmer Group (KTH) through the Social Forestry Program by the West Java Provincial Forestry Service is an effort to improve community welfare through the use of access to state forest and land management in accordance with the principles of sustainability. This research aims to analyze the success of forest farmers group in West Java is being empowered through the Social Forestry Program and the factors that hinder the empowerment. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques. This research uses the theory of empowerment success expressed by Wrihatnolo and Dwijowijoto which can be seen through indicators of access, participation, control, and welfare. In identifying the factors inhibiting the implementation of empowerment, the theory expressed by Arsiyah is used. The results show that the access indicator is good, but participation, control, and welfare need more work. Community participation is still minimal, so participation is low. Control is not complete because most people only meet with administrators. Welfare cannot rely only on gardens and tourism. Factors that prevent empowerment include limited resources, management, marketing, and support from others. Suggestions include having online meetings, creating new tourist attractions, and teaching farmers management and marketing skills.

Keywords: *Community Empowerment, Social Forestry, Forest Farmers Group*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris
Indonesia memiliki sebagian besar jumlah
penduduk yang bekerja di sektor

pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor
primer sekaligus sektor yang memegang
peranan penting bagi jalannya roda
perekonomian nasional. Kondisi tanah
yang subur untuk digunakan bercocok

tanam menjadi faktor yang menunjang kegiatan tersebut di Indonesia. Sektor pertanian berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus sebagai aspek pembangunan di negara berkembang. Berdasarkan pemaparan dari Tulus T. H. Tambunan (2003), yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi negara berkembang lebih unggul dalam pemanfaatan sumber daya alamnya.

Tabel 1.1 Jumlah pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

No.	Nama Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Pertanian	40.635.997
2	Perdagangan Besar – Eceran	25.800.553
3	Industri Pengolahan	18.671.926
4	Akomodasi-Makan-Minum	9.635.433
5	Konstruksi	8.188.425

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Menurut hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sektor pertanian dan perhutanan, jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut mencapai 40.635.997 jiwa, yang mana menjadi lapangan pekerjaan yang menyerap paling banyak tenaga kerja domestik. Jumlah tersebut merupakan

jumlah yang sangat fantastis karena porsinya mencapai 29,96% dari total keseluruhan penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 135,61 juta jiwa sekaligus menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan utama lainnya. Meskipun sektor pertanian merupakan sektor raksasa di Indonesia, tidak menutupi fakta bahwa sebagian besar petani Indonesia berada dalam garis kemiskinan.

Tabel 1.2 Presentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama

No.	Sumber Penghasilan Utama	Rumah Tangga Miskin (%)	Rumah Tangga Tidak Miskin (%)
1	Pertanian	51,33	31,6
2	Lainnya	29,69	47,05
3	Tidak Bekerja	12,9	12,22
4	Industri	6,08	9,13

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Kemiskinan rumah tangga di sektor pertanian dapat terjadi karena rendahnya pendapatan yang tidak bisa menutup pengeluaran dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, karena rendahnya pendapatan, tidak pula memiliki profesi yang mapan untuk menggantungkan kebutuhan hidup merupakan penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar rumah tangga yang bersumber penghasilan utama di sektor pertanian di

Indonesia menyebabkan para petani sulit dalam membiayai akses pendidikan layak sehingga menjadikan kurangnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para petani mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Berdasarkan data dari *website* Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan, sebesar 36,7% termasuk ke dalam kategori miskin. Sementara, angka kemiskinan yang ada di Pulau Jawa menyentuh angka 14 juta orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional yaitu sebanyak 26,5 juta penduduk. Data ini menunjukkan Pulau Jawa sebagai penyumbang angka penduduk miskin terbanyak.

Melihat banyaknya desa miskin di sekitar kawasan hutan di Pulau Jawa maka masalah ini dapat dipecahkan dengan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sebuah program pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya dan menjaga kelestarian dan keutuhan hutan. Program perhutanan sosial memiliki fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan kelompok tani hutan dengan tetap berlandaskan pada

aspek kelestarian dan keutuhan hutan. Perhutanan sosial membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan hutan negara dengan diberikannya izin garap dari pemerintah.

Tabel 1.3 Jumlah Program Perhutanan Sosial menurut Provinsi di Pulau Jawa

No.	Provinsi	Program Perhutanan Sosial
1	Jawa Barat	71
2	Jawa Tengah	49
3	Jawa Timur	49
4	DKI Jakarta	-
5	DI Yogyakarta	43
6	Banten	10

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan data pada Publikasi Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019, menunjukkan bahwa program perhutanan sosial Pulau Jawa telah dilaksanakan dengan Jawa Barat sebagai provinsi yang menduduki peringkat pertama provinsi yang mendapat program perhutanan sosial paling banyak. Hal ini tidak menutup kemungkinan banyaknya program perhutanan sosial di Jawa Barat terbebas

dari kendala dan permasalahan sehingga menarik untuk diteliti.

Agenda perhutanan sosial di Jawa Barat dimulai pada tahun 2017 melalui penyerahan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada kelompok tani hutan. Salah satu wilayah yang mendapat IPHPS Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.5320/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 adalah Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Pasca pemberian izin untuk mengelola hutan perhutanan sosial di Telukjambe dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Telukjambe mendirikan usaha wisata berbasis alam yang dinamakan Wisata Alam Kaliwungu. Melalui Wisata Alam Kaliwungu, kelompok tani hutan wisata alam Kaliwungu terus mendapatkan pemberdayaan, tetapi dalam menjalankannya kelompok tani hutan wisata alam Kaliwungu menghadapi berbagai permasalahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pendamping Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu, permasalahan yang didapati adalah

sosialisasi terkait peraturan program pemberdayaan belum maksimal dan tiap-tiap petani memiliki sebaran potensi lahan yang berbeda-beda sehingga tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk membangun usaha. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rakatama dan Pandit (2020), bahwa salah satu masalah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial adalah ketidakseimbangan sebaran sumber daya terhadap lahan yang diterima para petani. Tak hanya itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah Novita, dkk (2018), mendapati bahwa kondisi sumber daya dan potensi lahan garapan yang berbeda-beda menyebabkan ketimpangan pendapatan petani di Kulon Progo dari hasil pertanian.

Berangkat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh kelompok tani hutan Telukjambe dalam pengelolaan perhutanan sosial, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat (kelompok tani hutan) oleh pemerintah, dalam

hal ini melalui Dinas Kehutanan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program dimana sebuah desa memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengolah sumberdaya yang dimiliki dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan bisa mencakup kelembagaan, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Melihat permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah berhasil?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui

Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

D. Kerangka Teori

Paradigma Administrasi Publik

Berdasarkan pandangan dari Nicholas Henry (dalam Thoha, 2014:18) menjelaskan bahwa perkembangan administrasi dapat ditinjau berdasarkan perubahan paradigmanya. Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini dikarenakan dalam paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik telah dijelaskan antara fokus dan lokus di dalam administrasi publik. Kejelasan fokus dan lokus administrasi publik dalam penelitian

ini dimana fokusnya memiliki hubungan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan lokusnya antara lain masalah-masalah publik. Sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai masalah pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Administrasi Publik

Administrasi publik, berdasarkan pemikiran yang diungkapkan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban 2014:3) adalah sebuah sistem dimana sumber daya dan pegawai publik diatur disinergikan untuk mengatur, melaksanakan, dan mengorganisir ketetapan-ketetapan dalam kebijakan publik. Administrasi Publik memperlihatkan bagaimana pemerintah memiliki peran sebagai agen yang berdiri sendiri yang bertanggungjawab sebagai pihak yang menciptakan regulasi, yang aktif dan berinisiatif dalam mengatur dan mengambil keputusan, yang telah dipertimbangkan baik serta buruknya untuk masyarakat karena dalam hal ini

masyarakat merupakan pihak yang bersifat pasif, tidak berdaya, dan harus mengikuti ketetapan yang telah diatur.

Manajemen Publik

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh George Terry (dalam Syafie, 2006:49) mengatakan bahwa manajemen adalah sistem yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang tersedia. Pendapat lain oleh Prajudi (dalam Syafie, 2006:49) yang menjabarkan bahwa manajemen penggunaan dan pengawasan dari sumber daya serta kemungkinan adanya faktor-faktor yang ada melalui kegiatan perencanaan guna mendapatkan sukses dalam meraih tujuan awal

Pemberdayaan Masyarakat

Definisi dari pemberdayaan dapat diartikan menjadi sebuah metode dalam memberikan usaha atau daya (*power*) bagi golongan yang tidak memiliki daya (*powerless*), serta menekan kekuasaan (*disempowered*) bagi golongan yang dinilai memiliki kekuasaan (*powerfull*) sehingga suatu kesetaraan dapat tercipta (Oos M. Anwas, 2014). Pernyataan tersebut dapat diartikan, pemberdayaan berfungsi sebagai pemberi partisipasi dalam mendapatkan kekuasaan.

Keberhasilan Pemberdayaan

Masyarakat

Pandangan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152), menunjukkan terdapat empat aspek yang digunakan sebagai pengukur berhasil atau tidaknya sebuah pemberdayaan, antara lain:

- 1) Akses, dimensi ini erat kaitannya dengan masyarakat sebagai target dari pemberdayaan yang pada akhirnya mempunyai akses akan sumber daya yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas diri. Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh akses ke sumber daya yang tersedia sangat dibutuhkan dalam memperoleh kegunaan dari hasil pemberdayaan. Jika tidak mendapat akses maka berdampak pada jalannya pemberdayaan. Salah satu dampak tidak ada akses adalah dapat terjadi kesenjangan di antara masyarakat.
- 2) Partisipasi, keikutsertaan datang dari masyarakat sebagai target pemberdayaan dalam kegiatan yang ada. Peran serta masyarakat sangat kental dalam setiap rencana yang diambil.
- 3) Kontrol, aspek ini mengamati atau mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar sejalan dengan rencana awal.

- 4) Kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tercukupi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pandangan dari Arsiyah (2009:374) menjabarkan pemikirannya bahwa ada beberapa hambatan yang kemungkinan ditemui dalam kegiatan pemberdayaan, hambatannya bersifat internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup:

- 1) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Bahan baku yang tidak tersedia
- 3) Terbatasnya kemampuan dalam aspek manajerial
- 4) Tidak ada kemampuan dalam mengelola peluang pasar dan terbatasnya kepemilikan modal usaha

Sementara hambatan eksternalnya meliputi:

- 1) Kurang optimalnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat
- 2) Minimnya bantuan dari pihak luar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut pandangan dari Moleong (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah

pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, gambar-gambar, dan bukan angka. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti akan mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi yang diungkapkan dalam kata-kata dan bahasa, yang sesuai dengan konteks yang dialami.

Beberapa narasumber telah dipilih oleh penulis untuk menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018:138) *purposive sampling* merupakan metode pengambilan subyek melalui pertimbangan yang berdasarkan dengan ketentuan yang diinginkan guna menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti, di mana subjek informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wil. II Provinsi Jawa Barat; Pendamping Kelompok Tani Hutan; Sekretaris Jendral Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu; Ketua KUPS Wisata Alam Kaliwungu; dan Anggota-

anggota KUPS Wisata Alam Kaliwungu. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

1) Aspek Akses

Aspek akses adalah jalan awal untuk melakukan pemberdayaan kelompok tani hutan melalui program perhutanan sosial di Jawa Barat. Aspek akses memiliki dua sub aspek, yaitu akses fisik dan non fisik. Akses fisik sendiri merupakan akses yang berwujud atau *tangible*. Sedangkan akses non fisik merupakan akses yang tidak berwujud, tetapi keberadaannya dapat dirasakan.

a) Akses Fisik

akses fisik yang dimaksud berupa kemudahan dalam memperoleh bibit tanaman dan benih ikan, kondisi jalan yang bagus dalam mengakses wisata, dan alat-alat memadai yang dapat

digunakan petani untuk menggarap lahannya sehari-hari.

petani tidak mengalami kesulitan dalam mengakses bibit tanaman dan benih ikan. Hal ini karena dukungan kuat dari pihak pemerintah yang kerap memberikan bantuan dengan mendistribusikan bibit tanaman dan benih ikan.

Kemudahan dalam mendapatkan akses bibit tanaman dan benih juga ditunjang oleh kondisi jalan yang memadai. Kondisi akses jalan yang memadai menjadi faktor penting keberhasilan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah, akses jalan menuju Wisata Alam Kaliwungu dari tahun ke tahunnya telah diperbaiki agar lebih baik lagi.

Selain kemudahan akses dalam mendapatkan bibit tanaman dan benih ikan serta kondisi jalan yang memadai. Alat-alat untuk menggarap lahan pertanian juga patut untuk

dipertimbangkan. Alat-alat penggarap lahan tani merupakan faktor penunjang bagi petani untuk memanfaatkan lahan garapnya dengan maksimal, tanpa alat-alat yang memadai, ruang gerak petani dalam menggarap lahan menjadi sangat terbatas, pekerjaan yang seharusnya selesai dengan cepat juga pasti terhambat.

Aspek fisik juga mencakup sarana dan prasarana yang ada di kawasan pemberdayaan. Sarana yang dapat diakses seperti pupuk, paranet kebun untuk melindungi tanaman yang ditanaman di kebun, dan plastik *polybag* pengganti pot tanaman untuk menanam tanaman. Prasarana yang dapat diakses adalah embung ikan dan lahan kebun yang memadai untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan sarana dan prasarana yang didapatkan petani cukup layak untuk petani manfaatkan.

b) Akses Non Fisik

Akses non fisik dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial dapat ditinjau dari kemudahan para petani dalam mendapatkan akses informasi terkait program pemberdayaan dan minat masyarakat dalam merespon program pemberdayaan.

pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi sebaik mungkin. Sosialisasi gencar dilakukan oleh pendamping lapangan. Pendamping lapangan merupakan orang yang berhadapan secara langsung dengan para petani hutan. Jika terdapat informasi seputar kegiatan pemberdayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, atau Dinas Kehutanan Jawa Barat, pendamping lapangan lah yang bertugas untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dalam hal menyebarkan informasi, CDK Wil. II memiliki *platform* sosial media (Instagram) yang dapat diakses dengan mudah untuk mengetahui

kegiatan besar seperti bazaar tahunan dan pameran hasil alam.

Peran pendamping lapangan sangat besar dalam kegiatan sosialisasi ini. Pendamping lapangan dapat diibaratkan sebagai jembatan informasi antara pihak pemerintah dengan para petani. Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh pendamping lapangan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu, pendamping lapangan harus menjalani beberapa kegiatan pelatihan dan diklat untuk diedukasi dan dibekali pengetahuan mengenai konsep, aturan, hak, dan kewajiban pemegang izin lahan garan program Perhutanan Sosial.

Kegiatan sosialisasi berupa pelatihan-pelatihan juga memberikan akses informasi pengetahuan baru kepada petani. Melalui hal ini petani dapat mengakses pengetahuan seputar cara memelihara hewan ternak, budidaya ikan, penanaman dan panen

hasil kebun. Akses pengetahuan yang dapat dengan mudah didapatkan oleh petani dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani sehingga menunjang kegiatan pemberdayaan untuk mencapai keberhasilan.

petani menilai bahwa minat masyarakat cukup tinggi terhadap program pemberdayaan. Masyarakat yang menjadi target yang diberdayakan oleh program perhutanan sosial ini menjelaskan bahwa masyarakat tertarik mengikuti program perhutanan sosial ini karena membawa banyak manfaat, terutama dalam aspek ekonomi. Masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil garapan kebun dan wisata alam.

2) Aspek Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dari awal hingga akhir. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan merupakan

bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menjalani program pemberdayaan dari tahap perumusan, perencanaan, hingga pelaksanaan suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat sebagai target yang diberdayakan tentunya sangat dibutuhkan. Suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik apa bila tidak mendapat dukungan berupa keterlibatan masyarakat.

a) Perumusan Kegiatan

Perumusan kegiatan tertuang pada kegiatan rapat rutin baik mingguan atau bulanan untuk menyusun rencana kegiatan atau mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Kegiatan rapat rutin ini melibatkan aspirasi atau masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, yaitu kelompok tani Wisata Alam Kaliwungu. Dari beberapa aspirasi atau masukan, dipilihlah usulan yang paling tepat secara bersama-sama hingga semua pihak sepakat. Kegiatan ini difasilitasi oleh pihak pemerintah. Pendamping lapangan mengadakan rapat rutin yang dapat dihadiri oleh pengurus, bahkan

anggota kelompok tani Wisata Alam Kaliwungu, namun didapati bahwa partisipasi anggota kelompok tani dalam mengikuti rapat rutin ini tidak begitu tinggi. Hal ini disebabkan beberapa anggota kelompok tani jarang berada di dalam kawasan untuk mengikuti rapat rutin.

b) Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan tertuang pada kegiatan rencana rapat kerja awal tahun. Rapat ini biasanya juga terdapat andil dari pemerintah dan pihak dari Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu. Selain itu, petani dapat merencanakan tanaman apa yang ingin ditanam, bibit ikan apa yang ingin dikembangkan, dan hewan ternak apa yang ingin dipelihara, namun partisipasi petani dalam mengikuti kegiatan di tahap perencanaan hanya ikut di awal-awal saja, mereka mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti rapat perencanaan program karena sebagian dari mereka memiliki usaha lain di luar kawasan yang harus dipantau setiap waktu, sehingga tidak bisa mengikuti atau berpartisipasi pada kegiatan rapat perencanaan.

c) Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi petani justru cukup tinggi di tahap pelaksanaan. Mereka mengaku bahwa tahap pelaksanaan bukan suatu kegiatan rutin yang harus dihadiri tiap bulan atau minggu, sehingga mereka bisa mempersiapkan waktu untuk turut serta mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan. Terlebih lagi, pada setiap kegiatan di tahap pelaksanaan, biasanya mereka mendapat sosialisasi jauh dari waktu pelaksanaan, kegiatan tidak bersifat mendadak, sehingga mereka bersedia ikut kegiatan yang diselenggarakan.

3) Aspek Kontrol

Kontrol atau pengawasan berdasarkan pandangan dari Siagian (dalam Syamsidar, 2018) mengatakan bahwa kontrol atau pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama-sama sebelumnya.

a) Fungsi Kontrol CDK

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh CDK adalah menerjunkan petugas lapangan atau dapat disebut dengan pendamping lapangan. Fungsi pendamping lapangan adalah mendampingi dan memantau kelompok tani hutan satu langkah lebih dekat karena tugas pendamping lapangan berada di lokasi pemberdayaan berlangsung. Pendamping lapangan ini nantinya membuat laporan setiap bulannya untuk *update* segala progres dan hambatan yang dialami petani. Laporan ini nantinya ditinjau dengan teliti dan sebagai bahan untuk membenahi hal-hal yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan pemberdayaan

b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Rapat evaluasi dihadiri oleh pengurus Gapoktan, pihak KUPS Wisata Alam Kaliwungu, dan juga pendamping lapangan. Berdasarkan

pernyataan dari Sekretaris Jenderal Gapoktan dan Ketua KUPS, mengaku kerap mengikuti rapat evaluasi serta memantau progres penanaman bibit dan perawatan hewan. Kegiatan evaluasi biasanya membahas hal yang sudah disepakati bersama, kendala yang dialami petani, rencana kegiatan di masa mendatang, dan membuka forum aspirasi bagi para petani untuk menyuarakan usulan dan kritik yang ingin disampaikan.

bahwa rapat evaluasi hanya dihadiri oleh pengurus wisata alam dan pihak pemerintah saja. Keterlibatan anggota kelompok tani sangat minim. Kendala waktu menjadi penyebab utama terhalangnya keterlibatan petani untuk menghadiri rapat evaluasi rutin. Mereka cenderung sulit mendapatkan waktu luang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Beberapa dari mereka menyerahkan hak mereka untuk mengikuti rapat evaluasi kepada parapengurus.

4) Aspek Kesejahteraan

Menurut pandangan Sukmasari (2020:1-16), kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kebutuhan sandang serta pangan tercukupi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan melalui program Perhutanan Sosial merupakan bentuk upaya untuk melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari pihak masyarakat, didapati bahwa kebutuhan sandang dan pangan masyarakat untuk sehari-hari tidak bisa mengandalkan hanya dari pendapatan melalui hasil kebun dan wisata, namun mereka mengaku bahwa dengan adanya kegiatan pemberdayaan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial mereka mendapatkan tambahan penghasilan.

Tambahan penghasilan tersebut tidak bisa dijadikan sandaran untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Petani tidak bisa mengandalkan pendapatan dari hasil panen karena tanaman yang ditanam petani merupakan jenis tanaman musiman yang harus menunggu beberapa saat sebelum masa panen datang, ditambah kemarau panjang yang menerpa belakangan ini

membuat hasil panen menjadi tidak begitu banyak. Pendapatan dari wisata juga mengalami pasang dan surut, ada hari dimana wisata ramai pengunjung dan sepi pengunjung. Petani mengaku produk petani yang dijual tidak setiap hari laku dibeli pengunjung.

Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan para petani jika mengandalkan hasil pendapatan dari kebun dan wisata membuat sebagian dari mereka mencari penghasilan lain di luar kawasan perhutanan sosial sebagai sumber pemasukan tambahan. Jika mereka hanya mengandalkan pendapatan dari hasil kebun dan wisata, mereka tidak bisa untuk menabung. Hasil pendapatan hanya habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Petani tidak mau mengambil risiko ini, karena menghindari jika terjadi sesuatu hal yang mendadak dan membutuhkan pengeluaran besar. Berangkat dari masalah ini, masyarakat memutuskan untuk membagi waktunya antara berkegiatan di dalam kawasan perhutanan sosial dan mencari pendapatan penghasilan tambahan dari luar.

B. Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Faktor penghambat yang ditemui sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Arsiyah (2009:374) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan internal dan eksternal. Faktor penghambat internal mencakup:

1) Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan tenaga dalam menggarap lahan perkebunan tanpa dibekali pengetahuan yang cukup mengenai pengetahuan menanam bibit dan jenis ikan tertentu dengan baik. Hal ini turut berdampak pada daya masyarakat dalam berinovasi.

Inovasi dapat berupa cara masyarakat dalam menaikkan nilai jual hasil kebun. Inovasi sangat penting untuk dilakukan guna menarik minat pengunjung untuk datang berwisata.

Selanjutnya, masih dalam lingkup seputar sumber daya manusia dalam keberjalanan kegiatan pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu, komitmen yang dimiliki masyarakat sebagai target pemberdayaan dalam memberikan partisipasi pada kegiatan rapat perencanaan dan evaluasi. Minat dan keinginan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ini berbanding terbalik dengan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat minim pada kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan

2) Terbatasnya Kemampuan dalam Aspek Manajerial

minimnya figur dengan kemampuan manajerial dalam kelompok tani merupakan suatu kendala dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini merujuk

pada kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengelola sumber daya dengan baik. Hal ini dapat berdampak meningkatkan resiko kegagalan dalam menjalankan suatu kegiatan, pengambilan keputusan yang kurang tepat, dan kurangnya efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.

3) Tidak Ada Kemampuan dalam Mengelola Peluang Pasar

Petani merasa kesulitan dalam melakukan pemasaran hasil produk olahan maupun mentah dari lahan garapan masing-masing. Pemasaran yang dilakukan masih dengan cara manual yaitu ditawarkan pada pengunjung Wisata Alam Kaliwungu. Selain itu, petani juga sudah mencoba menawarkan hasil panennya pada kios-kios di pasar setempat, namun kebanyakan kios-kios penjual sayur di pasar sudah ada *supplier* atau pemasok sayur-sayuran sendiri.

Faktor penghambat eksternal yang dialami petani adalah minimnya bantuan yang didapatkan

dari pihak luar. kegiatan pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu masih minim dalam mendapatkan bantuan atau dukungan dari pihak luar. Petani merasa kebutuhan untuk menunjang jalannya kegiatan pemberdayaan sebagian besar masih mereka usahakan sendiri tanpa adanya bantuan modal atau dana dari pihak luar. Bantuan dari pihak luar yang datang berupa dana CSR untuk pembelian bibit, namun hal tersebut hanya sekali terjadi dan jarang sekali pihak luar lainnya datang untuk memberikan dukungan terhadap jalannya kegiatan pemberdayaan. Padahal dukungan dari pihak luar sangat diperlukan untuk memperoleh teknologi, peralatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial secara umum masih belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kapasitas target pemberdayaan karena masih terdapat beberapa aspek keberhasilan pemberdayaan yang belum terpenuhi seutuhnya, namun ada juga aspek keberhasilan pemberdayaan yang sudah sesuai. Aspek yang sudah terpenuhi adalah aspek fisik, sedangkan aspek yang belum terpenuhi adalah aspek partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan.

Aspek akses memiliki dua sub aspek yaitu akses fisik dan akses non fisik. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan masyarakat, masyarakat menyatakan bahwa akses fisik berupa bibit tanaman dan benih ikan, kondisi jalan menuju kawasan wisata alam, alat-alat penggarap lahan mudah untuk didapatkan dan sarana prasarana yang didapatkan petani. Akses non fisik berupa

pengetahuan masyarakat terkait pemberdayaan melalui perhutanan sosial yang mudah untuk didapatkan dan tingginya minat masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Aspek partisipasi dilihat dari kegiatan partisipasi masyarakat dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan perumusan dan perencanaan kegiatan berupa kehadiran dalam rapat rutin baik mingguan atau bulanan dan rapat rencana kerja awal tahun sangat minim. Lain hal dengan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan seperti pameran produk KUPS se-Jawa Barat, pelatihan penanaman bibit, dan pembagian benih ikan, masyarakat turut berpartisipasi aktif.

Aspek kontrol berupa ruang dalam menyampaikan evaluasi rutin yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan pengurus kelompok tani belum sepenuhnya meraup partisipasi dan

keterlibatan anggota kelompok tani dengan sempurna. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kegiatan ini hanya dihadiri oleh pengurus kelompok dan pihak pemerintah saja.

Aspek kesejahteraan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tidak bisa sepenuhnya tercukupi jika hanya mengandalkan hasil kebun dan pendapatan dari Wisata Alam. Hasil kebun tidak bisa dipanen setiap hari karena kebanyakan tanaman bersifat musiman. Pendapatan dari tiket masuk pengunjung wisata juga pasang surut. Hal ini membuat petani mencari sumber pendapatan lain di luar kawasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung.

Faktor penghambat internal terdiri dari terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan manajerial, dan terbatasnya kemampuan pengelolaan peluang pasar yang baik. Faktor penghambat internal datang dari

minimnya bantuan yang datang dari pihak luar.

SARAN

Saran yang dapat peneliti sampaikan agar Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dapat terselenggara menjadi lebih baik kedepannya, adalah sebagai berikut:

1. Saran dalam mempertahankan aspek akses yang sudah berjalan baik adalah dengan lebih melengkapi sarana prasarana penunjang pemberdayaan dan meningkatkan transparansi informasi untuk membangun kepercayaan petani.
2. Saran dalam meningkatkan aspek partisipasi dan kontrol adalah melakukan pemberitahuan awal rapat, menyiapkan agenda rapat yang terstruktur, dan membuat notulensi rapat serta menyiapkan opsi pilihan partisipasi alternatif, berupa rapat daring bagi petani yang tidak berada di kawasan.
3. Saran dalam meningkatkan aspek kesejahteraan adalah dengan meningkatkan pendampingan dan pengawasan yang lebih intens dari pihak pemerintah, tidak hanya pada

saat kegiatan pembagian bibit dan benih, namun pasca kegiatan juga. Lebih lanjut, menciptakan atraksi wisata baru guna menarik pengunjung.

4. Saran dalam mengatasi faktor penghambat internal yaitu dengan mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan manajemen dan pelatihan analisis peluang pasar melalui *e-commerce* serta melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak luar seperti pusat oleh-oleh atau perbelanjaan.
5. Saran dalam rangka mengatasi faktor penghambat eksternal yaitu membuat dan mengajukan proposal bantuan dana CSR yang ditujukan ke perusahaan sekitar guna mendapatkan bantuan modal serta berpartisipasi aktif pada komunitas lokal dan jaringan kelompok tani untuk membuka peluang dalam berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M, 2014. Pemberdayaan Masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta
- Arsiyah. A. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa, WACANA Vol. 12 No. 2.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Publikasi Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Presentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama. BPSIndonesia.
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.fopol.2019.102052>
- Dewi, I. N., Andayani, W., & Suryanto, P. (2018). Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(1), 86-98.
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Cetakan 36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmasari, Dahliana. 2020. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan* 3, No. 1
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D, penerbit
Alfabeta,Bandung

- Syafie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik, Cet 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsidar, Erni dan Sartibi Bin Hasyim, 2018. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anaka (RPSAA) Ciburupan Garut. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 9, No. 1, Hal 12-20.
- Thoha, Miftah. 2014. Ilmu Administrasi Negara Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Tulus, T.H. Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : ElexMedia Komputindo.